

Artikel : **Akses terbuka/Open Access**

Prospek Swasembada Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Metode LQ, DLQ, dan Tipologi Klassen

Sitasi : Saragih. 2025, JSTAR 5(1), 157-171.

Kronologi naskah.

Submit : 25 Maret 2025

Revisi : 13 Mei 2025

Diterima : 29 Juni 2025



Lembaga yang independen, Terpercaya
dan Berperan Aktif dalam Mendukung
Perumusan Kebijakan Berbasis Data



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PROSPEK SWASEMBADA BERAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: METODE LQ, DLQ, DAN TIPOLOGI KLASSEN

Amudi Pandapotan Saragih¹

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

✉korespondensi penulis: amudisaragih@bps.go.id

Abstract

Food self-sufficiency is one of the Asta Cita programs of Indonesian President Prabowo and Indonesian Vice President Gibran Rakabuming Raka in the field of food security. The Provincial and Regional Governments in Nusa Tenggara Timur (NTT) are committed to supporting the implementation of the food security improvement strategy program in NTT. This study focuses on grouping rice production bases based on regency/municipality in NTT using the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Klassen Typology Quadrant Analysis methods. Based on the results of the LQ and DLQ calculations, these area then classified into the Klassen Typology section to examine the prospects of each regency/municipality classified into 4 quadrants. Quadrant I includes the regencies of Sumba Barat, Ende, and Sumba Tengah, Quadrant II includes the regencies of Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Sikka, and Sabu Raijua, Quadrant III includes the regencies of Sumba Timur, Kupang, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur, and Kupang City, and Quadrant IV includes the regencies of Belu, Lembata, Flores Timur, SBD, and Malaka.

Keywords: *Food Self-Sufficiency, Rice, LQ, DLQ, Klassen Typology*

1. Pendahuluan

Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara atau wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya secara mandiri, tanpa bergantung pada impor dari negara atau wilayah lain. Swasembada pangan menjadi salah satu program Asta Cita Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam bidang ketahanan pangan. Program ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Program swasembada pangan ini menjadi program strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan dapat terwujud dalam waktu 4-5 tahun mendatang.

Kepala Badan Pangan Nasional

menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden, semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah harus fokus dan bersinergi untuk mempercepat terwujudnya target swasembada pangan. Arahan ini ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian dan segenap Kepala Daerah se-NTT untuk berkomitmen dalam mendukung jalannya program strategi peningkatan ketahanan pangan di Provinsi NTT. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan potensi pertanian di NTT terbilang besar, dengan sekitar 85 persen wilayahnya berorientasi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sejalan juga dengan kontribusi sektor pertanian yang menjadi motor utama penggerak perekonomian provinsi NTT, dimana sektor pertanian pada tahun 2024 menyumbang sebesar 28,87 persen dan sub sektor tanaman pangan berkontribusi sebesar 6,62 persen dari total perekonomian Provinsi NTT.

Salah satu komoditas pangan yang memiliki posisi strategis adalah beras dimana komoditas ini dihasilkan dari padi yang menjadi makanan utama hampir semua penduduk. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mengandalkannya sebagai sumber utama makanan pokok. Peran utama padi adalah sebagai penyedia kebutuhan pangan nasional, dan hingga saat ini belum ada sektor lain yang dapat menggantikannya. Karena sektor

tanaman padi sangat krusial bagi ketahanan pangan nasional, pengembangan dan keberlanjutannya menjadi sangat penting untuk dijaga. Muhajirin et al., (2014) menyatakan bahwa padi merupakan komoditas strategis yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, mengingat sekitar 95 persen masyarakat Indonesia masih bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama.

Permintaan terhadap bahan pangan, khususnya beras, akan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Menurut Muhammad dan Kurniadi (2024), beras dianggap sebagai komoditas yang memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas ekonomi dan politik. Kekurangan pasokan beras di berbagai daerah dapat memicu gangguan sosial dan politik, mengingat beras berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Provinsi NTT adalah salah satu wilayah kepulauan dengan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerahnya (Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini telah menghasilkan padi dalam rentang waktu 2018 hingga 2024. Namun, potensi yang ada di setiap daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk produksi padi.

Prospek swasembada pangan di

Provinsi NTT menarik untuk diteliti mengingat NTT selama ini dikenal bukan sentra produksi padi. Produksi dan produktivitas padi di NTT lebih rendah dari rata-rata produksi dan produktivitas nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian terkait prospek NTT mencapai swasembada pangan dengan memperhitungkan potensi wilayah dalam memproduksi padi.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek swasembada pangan di Provinsi NTT. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi NTT yang memiliki potensi dalam memproduksi padi. Dengan pengelompokan ini, diharapkan pemerintah dapat mengetahui kabupaten/kota mana yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah penghasil padi di masa yang akan datang, sehingga segala kebijakan yang akan diambil nantinya akan lebih tepat sasaran dalam mencapai target swasembada pangan di Provinsi NTT.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Survei Kerangka Sampel Area (KSA) tahun 2018-2024. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki potensi dalam memproduksi padi di Provinsi NTT dengan menggunakan metode

Location Quotient (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dan Analisis Kuadran Tipologi Klassen.

Bahan dan Sumber Data

Adapun penelitian ini menggunakan data produksi padi yang bersumber dari Survei Kerangka Sampel Area (KSA) menurut kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2018-2024. Sedangkan Produksi Jagung bersumber dari Provinsi NTT Dalam Angka tahun 2020-2024. Data produksi padi dan jagung digunakan untuk mewakili data tanaman pangan.

Metode Analisis Data

Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan potensi daerah penghasil padi di masa yang akan datang menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dan Analisis Kuadran Tipologi Klassen.

A. *Location Quotient* (LQ)

Potensi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memproduksi padi dianalisis dengan metode *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan basis. Komoditas basis diukur dalam dua level wilayah, yaitu level wilayah nasional dan level wilayah provinsi. LQ dihitung berdasarkan produksi padi di tingkat nasional dan produksi padi di tingkat provinsi. Pengukuran LQ menggunakan rumus Hendayana (2003), sebagai berikut :

LQ pertanian tingkat nasional:

$$LQ = \frac{Jp_i / \sum JTp_i}{JPN / \sum JTN}$$

Dimana :

Jp_i = jumlah produksi padi pada provinsi i pada tahun tertentu (ton)

$\sum JTp_i$ = total produksi tanaman pangan pada tingkat provinsi i pada tahun tertentu (ton)

JPN = jumlah produksi padi pada tingkat nasional pada tahun tertentu (ton)

$\sum JTN$ = total produksi tanaman pangan pada tingkat nasional pada tahun tertentu (ton)

LQ pertanian tingkat provinsi:

$$LQ = \frac{Jk_i / \sum JTk_i}{JPP / \sum JTP}$$

Dimana :

Jk_i = jumlah produksi padi pada kabupaten/kota i pada tahun tertentu (ton)

$\sum JTk_i$ = total produksi tanaman pangan pada tingkat kabupaten/kota i pada tahun tertentu (ton)

JPP = jumlah produksi padi pada tingkat provinsi pada tahun tertentu (ton)

$\sum JTP$ = total produksi tanaman pangan pada tingkat provinsi pada tahun tertentu (ton)

Kriteria :

1. Jika nilai $LQ > 1$ berarti tanaman padi tersebut termasuk dalam komoditi unggulan atau sektor tersebut tergolong basis.
2. Jika nilai $LQ < 1$ berarti tanaman

padi tersebut termasuk dalam komoditas bukan unggulan atau sektor tersebut non basis.

B. *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ) merupakan pengembangan dari LQ dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu (Nugroho, 2010). DLQ mengakomodasi laju pertumbuhan ekonomi suatu sektor amatan maupun perekonomian secara keseluruhan selama periode tertentu. Dalam penelitian ini akan dibandingkan terhadap laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan dan total pertumbuhan ekonomi pada level kabupaten/kota dan provinsi di NTT. Hasil analisis DLQ menunjukkan potensi suatu sektor untuk menjadi basis ekonomi di masa mendatang. Dengan mengombinasikan antara LQ dan DLQ, pengambil kebijakan dapat menilai peran suatu sektor ekonomi dalam perekonomian termasuk prospek sektor tersebut ke depan.

Metode DLQ menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DLQ = \frac{[(1 + G_{ij}) / (1 + G_j)]^t}{[(1 + G_i) / (1 + G)]^t}$$

Dimana :

DLQ = Indeks Koefisien DLQ

G_{ij} = Laju pertumbuhan PDRB sektor i di kabupaten/kota j

G_j = Laju pertumbuhan PDRB di kabupaten/kota j

G_i = Laju pertumbuhan PDRB sektor

i di Provinsi NTT
 G = Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi NTT
 t = Kurun waktu analisis

Kriteria :

1. Apabila nilai $DLQ=1$, artinya pertumbuhan sektor i dengan PDRB kabupaten/kota potensinya sebanding dengan provinsi.
2. Apabila nilai $DLQ<1$, artinya pertumbuhan sektor i dengan PDRB kabupaten/kota potensinya lebih rendah dengan provinsi.
3. Apabila nilai $DLQ>1$, artinya pertumbuhan sektor i dengan PDRB kabupaten/kota potensinya lebih cepat dengan provinsi.

C. Analisis Kuadran Tipologi Klassen

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan sektor basis produksi di suatu wilayah adalah Tipologi Klassen. Metode ini mengelompokkan sektor produksi suatu daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan produksi padi di wilayah yang dianalisis dengan wilayah lain sebagai acuan (Nugroho, 2010). Jika analisis dilakukan pada tingkat kabupaten atau kota, maka data produksi padi di tingkat provinsi dapat dijadikan sebagai pembanding. Hasil analisis menggunakan Tipologi Klassen dapat memberikan gambaran mengenai posisi pertumbuhan serta kontribusi sektor, subsektor, usaha, atau komoditas yang membentuk variabel

regional suatu wilayah (Kurniati, 2020).

Nilai LQ dan DLQ dikombinasikan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan setiap aktivitas ekonomi dalam diagram Tipologi Klassen. Diagram ini terdiri dari empat kuadran yang memproyeksikan sektor produksi padi berdasarkan hasil penghitungan LQ dan DLQ.

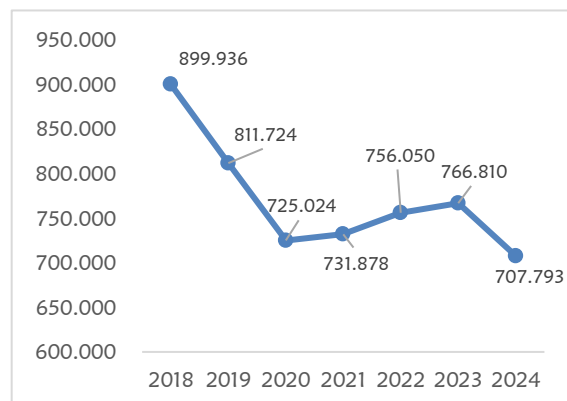
Kuadran I Sektor Basis, Prospektif $LQ>1, DLQ>1$	Kuadran III Sektor Basis, Non Prospektif $LQ>1, DLQ<1$
Kuadran II Sektor Non Basis, Prospektif $LQ<1, DLQ>1$	Kuadran IV Sektor Non Basis, Non Prospektif $LQ<1, DLQ<1$

Gambar 1. Bagan Tipologi Klassen

3. Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Deskriptif

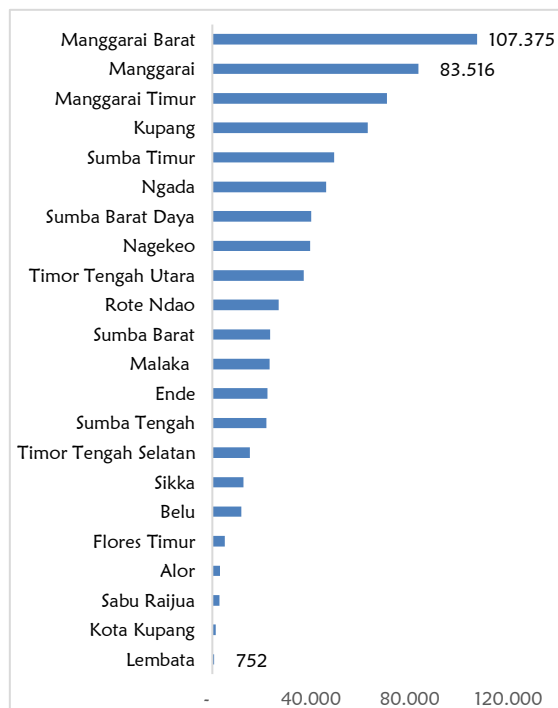
Produksi padi di Provinsi NTT sejak tahun 2018-2024 dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Produksi Padi di NTT 2018-2024

Produksi padi tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 899.936 ton dan cenderung menurun terus hingga tahun 2024 menjadi sebesar 707.793 ton.

Jika diuraikan menurut kabupaten/kota, dari total produksi padi di Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 707.793 ton, tertinggi ada pada Kabupaten Manggarai Barat sebesar 107.375 ton dan terendah di Kabupaten Lembata hanya sebesar 752 ton. Lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Produksi Padi di NTT menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

b. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Swasembada beras merujuk pada kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri melalui hasil produksi sendiri. Seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, prospek swasembada dapat dianalisis berdasarkan potensi pengembangan komoditas di suatu daerah dengan menggunakan indikator LQ. Nilai LQ mengidentifikasi komoditas unggulan yang memiliki daya saing serta keunggulan komparatif (Setiyanto, 2013), sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di wilayah tersebut.

Hasil penghitungan LQ komoditas padi di Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan nilai LQ produksi padi yang beragam antar provinsi. Berdasarkan nilai LQ padi pada tingkat nasional, padi tidak merupakan komoditas basis Provinsi NTT. Hal ini terlihat dari nilai LQ komoditas padi memiliki nilai lebih kecil dari satu yakni sebesar 0,94. Artinya komoditas padi di Provinsi NTT belum menjadi spesialisasi kegiatan masyarakat dan belum mendapat alokasi penggunaan lahan yang memadai. Ini mengindikasikan bahwa komoditas padi belum memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Provinsi NTT.

Tabel 1. Rata-rata nilai LQ Produksi Padi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2024

Provinsi	LQ
Aceh	1.16
Sumatera Utara	0.87
Sumatera Barat	0.96
Riau	1.19
Jambi	1.17
Sumatera Selatan	1.10
Bengkulu	1.06
Lampung	0.92
Kep. Bangka Belitung	1.19
Kep. Riau	1.17
Dki Jakarta	1.19

Provinsi	LQ
Jawa Barat	1.14
Jawa Tengah	1.01
Di Yogyakarta	0.94
Jawa Timur	0.90
Banten	1.18
Bali	1.13
Nusa Tenggara Barat	0.79
Nusa Tenggara Timur	0.94
Kalimantan Barat	1.13
Kalimantan Tengah	1.12
Kalimantan Selatan	1.08
Kalimantan Timur	1.15
Kalimantan Utara	1.17
Sulawesi Utara	0.88
Sulawesi Tengah	1.11
Sulawesi Selatan	1.03
Sulawesi Tenggara	1.07
Gorontalo	0.54
Sulawesi Barat	1.13
Maluku	1.09
Maluku Utara	1.02
Papua Barat	1.04
Papua Barat Daya	0.20
Papua	0.99
Papua Selatan	0.36
Papua Tengah	0.19
Papua Pegunungan	0.06

Lebih lanjut LQ juga dihitung di tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hasil penghitungan LQ di tingkat kabupaten/kota lebih bervariasi sebagaimana pada Tabel 2. Dari tabel ini terlihat hal menarik yakni posisi Kota Kupang yang memiliki nilai LQ komoditas padi relatif tinggi. Padahal secara empiris Kota Kupang memiliki total luas lahan pertanian relatif kecil dan tidak dominan dibandingkan wilayah kabupaten lainnya.

Kondisi ini terjadi karena persentase luas lahan padi di Kota Kupang terhadap total lahan pertaniannya lebih besar dibandingkan dengan persentase luas lahan padi di tingkat provinsi terhadap total lahan pertanian provinsi.

Oleh sebab itu, dalam pengembangan suatu komoditas, nilai LQ di tingkat kabupaten/kota ada baiknya mempertimbangkan posisi komoditas tersebut di tingkat provinsi. Tingginya nilai LQ tidak selalu menunjukkan luas lahan yang lebih besar, melainkan mencerminkan proporsi relatif luas lahan padi dalam suatu wilayah (Hendayana, 2003).

Tabel 2. Rata-rata Nilai LQ Produksi Padi di Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2018-2024

Kabupaten/Kota	LQ	Hasil
Sumba Barat	1.22	Basis
Sumba Timur	1.17	Basis
Kupang	1.11	Basis
TTS	0.42	Non Basis
TTU	0.86	Non Basis
Belu	0.74	Non Basis
Alor	0.44	Non Basis
Lembata	0.39	Non Basis
Flores Timur	0.72	Non Basis
Sikka	0.77	Non Basis
Ende	1.15	Basis
Ngada	1.25	Basis
Manggarai	1.58	Basis
Rote Ndao	1.40	Basis
Manggarai Barat	1.48	Basis
Sumba Tengah	1.04	Basis
SBD	0.69	Non Basis
Nagekeo	1.34	Basis
Manggarai Timur	1.41	Basis
Sabu Raijua	0.97	Non Basis
Malaka	0.68	Non Basis
Kota Kupang	1.12	Basis

Berdasarkan kabupaten yang ditetapkan sebagai pusat pengembangan padi dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 terdapat 9 dari 10 Kabupaten yang memiliki kesesuaian potensi produksi padi antara SK Menteri Pertanian dengan hasil daripada penghitungan LQ ($LQ > 1$)

yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya tidak memiliki potensi sebagai kawasan pengembangan produksi padi karena nilai LQ lebih kecil dari 1.

Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata nilai LQ di atas, Provinsi NTT memiliki 12 kabupaten/kota yang memiliki basis produksi padi sedangkan 10 kabupaten/kota merupakan non basis produksi padi.

c. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Berdasarkan analisis DLQ sebagaimana pada tabel 3 di bawah, terdapat 8 kabupaten/kota yang akan prospektif menjadi basis produksi padi pada masa yang akan datang. Delapan kabupaten/kota tersebut memiliki nilai koefisien $DLQ > 1$, yaitu Kabupaten Sumba Barat, TTS, TTU, Alor, Sikka, Ende, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua.

Sedangkan 14 kabupaten/kota yang akan tidak prospektif menjadi basis produksi padi di masa yang akan datang ($DLQ < 1$) meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Belu, Lembata, Flores Timur, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, SBD, Nagekeo, Manggarai Timur, Malaka dan Kota Kupang.

Kabupaten/kota dengan nilai $DLQ < 1$ artinya tanaman padi tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis (komoditas unggulan) pada masing-masing wilayah di masa yang akan

datang.

Tabel 3. Rata-rata Nilai DLQ Produksi Padi di Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2018-2024

Kabupaten/ Kota	DLQ	Hasil
Sumba Barat	69,47	Prospektif
Sumba Timur	-8,69	Non Prospektif
Kupang	-19,81	Non Prospektif
TTS	10,77	Prospektif
TTU	39,09	Prospektif
Belu	-5,72	Non Prospektif
Alor	9,03	Prospektif
Lembata	-15,41	Non Prospektif
Flores Timur	-17,86	Non Prospektif
Sikka	3,65	Prospektif
Ende	1.181,64	Prospektif
Ngada	-2,99	Non Prospektif
Manggarai	-2,27	Non Prospektif
Rote Ndao	0,58	Non Prospektif
Manggarai Barat	-8,35	Non Prospektif
Sumba Tengah	12,33	Prospektif
SBD	-5,05	Non Prospektif
Nagekeo	-10,30	Non Prospektif
Manggarai Timur	0,88	Non Prospektif
Sabu Raijua	22,27	Prospektif
Malaka	-316,47	Non Prospektif
Kota Kupang	0,13	Non Prospektif

Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ terhadap produksi padi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTT selama periode 2018–2024, terjadi pergeseran peran sektor produksi padi. Beberapa daerah yang sebelumnya berperan sebagai sektor basis mengalami penurunan hingga menjadi sektor non-prospektif, sementara daerah lainnya justru mengalami peningkatan peran. Keseluruhan hasil analisis kombinasi LQ dan DLQ yang menggambarkan perubahan peran dalam produksi padi dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Perubahan Peran Sektor Produksi Padi di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2018-2024

Kabupaten /Kota	LQ	DLQ	Hasil
Sumba Barat	1,22	69,47	Basis-Prospektif
Sumba Timur	1,17	-8,69	Basis-Non Prospektif
Kupang	1,11	-19,81	Basis-Non Prospektif
TTS	0,42	10,77	Non Basis-Prospektif
TTU	0,86	39,09	Non Basis-Prospektif
Belu	0,74	-5,72	Non Basis-Non Prospektif
Alor	0,44	9,03	Non Basis-Prospektif
Lembata	0,39	-15,41	Non Basis-Non Prospektif
Flores Timur	0,72	-17,86	Non Basis-Non Prospektif
Sikka	0,77	3,65	Non Basis-Prospektif
Ende	1,15	1.181,6	Basis-Prospektif
Ngada	1,25	-2,99	Basis-Non Prospektif
Manggarai	1,58	-2,27	Basis-Non Prospektif
Rote Ndao	1,40	0,58	Basis-Non Prospektif
Manggarai Barat	1,48	-8,35	Basis-Non Prospektif
Sumba Tengah	1,04	12,33	Basis-Prospektif
SBD	0,69	-5,05	Non Basis-Non Prospektif
Nagekeo	1,34	-10,30	Basis-Non Prospektif
Manggarai Timur	1,41	0,88	Basis-Non Prospektif
Sabu Raijua	0,97	22,27	Non Basis-Prospektif
Malaka	0,68	-316,4	Non Basis-Non Prospektif
Kota Kupang	1,12	0,13	Basis-Non Prospektif

Dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT terjadi perubahan basis menjadi non-prospektif dan non basis menjadi prospektif. Kabupaten/kota yang mengalami reposisi basis menjadi non-prospektif meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur dan Kota Kupang. Sedangkan kabupaten/kota yang

mengalami perubahan dari non basis menjadi prospektif yaitu Kabupaten TTS, TTU, Alor, Sikka, dan Sabu Raijua.

Wilayah yang dikategorikan sebagai prospektif adalah daerah yang menunjukkan potensi untuk berkembang dan mengalami peningkatan di masa depan. Baik wilayah yang sudah menjadi sektor basis maupun yang belum, tetapi memiliki prospek pertumbuhan, dapat dijadikan fokus utama dalam strategi pengembangan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, produksi padi di wilayah tersebut dapat terus ditingkatkan. Daerah yang memiliki prospek ini berpotensi berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan produksi padi, terutama jika mendapatkan perhatian serta dukungan dalam bentuk kebijakan dan pengelolaan yang tepat.

d. Analisis Kuadran Tipologi Klassen

Hasil penghitungan LQ dan DLQ selanjutnya digunakan untuk mengelompokkan masing-masing kabupaten dan kota ke dalam kategori yang terdapat dalam Tipologi Klassen. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis prospek pengembangan sektor produksi padi di setiap daerah.

Kabupaten dan kota yang tergolong dalam Kuadran I Tipologi Klassen merupakan wilayah yang telah menjadi sektor basis serta memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Beberapa daerah yang termasuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Sumba Barat, Ende, dan Sumba Tengah,

yang menunjukkan keunggulan dalam produksi padi serta peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.

<p>Kuadran I Sektor Basis, Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumba Barat • Ende • Sumba Tengah 	<p>Kuadran III Sektor Basis, Non Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumba Timur • Kupang • Ngada • Manggarai • Rote Ndao • Manggarai Barat • Nagekeo • Manggarai Timur • Kota Kupang
<p>Kuadran II Sektor Non Basis, Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTS • TTU • Alor • Sikka • Sabu Raijua 	<p>Kuadran IV Sektor Non Basis, Non Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belu • Lembata • Flores Timur • SBD • Malaka

Gambar 4. Klasifikasi Sektor Produksi Padi Provinsi NTT 2018-2024 berdasarkan Tipologi Klassen

Kabupaten dan kota yang tergolong dalam Kuadran II juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh para pengambil kebijakan. Meskipun wilayah-wilayah ini belum menjadi sektor basis dalam produksi padi di Provinsi NTT, beberapa daerah seperti Kabupaten TTS, TTU, Alor, Sikka, dan Sabu Raijua tetap menunjukkan peluang untuk peningkatan produksi. Upaya pengembangan di daerah-daerah ini akan lebih efektif jika dilakukan melalui kerja sama yang solid antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Sinergi yang kuat dalam hal perencanaan, pendanaan, dan

penerapan kebijakan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas padi di wilayah-wilayah tersebut.

Wilayah yang tergolong dalam Kuadran III merupakan daerah yang sebelumnya berperan sebagai sektor basis dalam produksi padi, namun di masa mendatang diprediksi tidak lagi memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa daerah yang termasuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur, serta Kota Kupang.

Penurunan prospek pengembangan di wilayah-wilayah tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan lahan tanam akibat perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman atau penggunaan lainnya. Selain itu, faktor geografis juga berperan dalam membatasi perluasan area pertanian padi, di mana kondisi alam di beberapa daerah tidak lagi mendukung pengembangan lahan pertanian secara optimal.

Terakhir, Kuadran IV mencerminkan wilayah yang tidak termasuk sebagai basis produksi padi dan juga tidak memiliki prospek untuk dikembangkan di masa mendatang. Dalam kategori ini, terdapat lima daerah yang masuk dalam klasifikasi tersebut, yaitu Kabupaten Belu, Lembata, Flores Timur, SBD, dan Malaka.

Di wilayah-wilayah ini, padi bukanlah komoditas unggulan, sehingga

pengembangannya kurang potensial dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya yang lebih dominan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah keberadaan komoditas lain yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut, baik dari segi kondisi geografis, iklim, maupun pola ekonomi masyarakat setempat, sehingga lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dibandingkan dengan padi.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) subsektor produksi padi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT Tahun 2018-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Produksi padi di Provinsi NTT cenderung terus menurun dari tahun 2018-2024. Produksi padi tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 899.936 ton dan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 707.793 ton. Pada tahun 2024, produksi tertinggi ada pada Kabupaten Manggarai Barat sebesar 107.375 ton dan terendah di Kabupaten Lembata hanya sebesar 752 ton.
- b. Penghitungan dari LQ menunjukkan bahwa terdapat 12 kabupaten/kota yang merupakan sektor basis produksi padi dan sisanya sebanyak 10 kabupaten/kota yang bukan merupakan sektor basis produksi padi. Sedangkan hasil dari DLQ terdapat 8 kabupaten/kota yang

akan prospektif menjadi basis produksi padi pada masa yang akan datang dan 14 kabupaten/kota yang tidak prospektif menjadi basis produksi padi di masa yang akan datang.

- c. Pendekatan analisis tipologi klassen telah berhasil mengklasifikasikan kabupaten dan kota yang berperan dalam sektor produksi padi ke dalam empat kategori utama. Kuadran I (sektor basis, prospektif) meliputi Kabupaten Sumba Barat, Ende, dan Sumba Tengah. Kuadran II (sektor non basis, prospektif) meliputi Kabupaten TTS, TTU, Alor, Sikka, dan Sabu Raijua. Sementara itu, Kuadran III (sektor basis, non prospektif) mencakup Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Kota Kupang. Terakhir wilayah yang masuk dalam kuadran IV (sektor non basis, non prospektif) yaitu Kabupaten Belu, Lembata, Flores Timur, SBD, dan Malaka.

Rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di NTT dalam hal pengambilan kebijakan perihal swasembada pangan di Provinsi NTT di rinci berdasarkan letak kabupaten/kota pada tipologi klassen:

- a. Wilayah pada kuadran I (sektor basis, prospektif), memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dalam produksi padi. Agar pertumbuhan sektor ini semakin optimal, berikut saran yang dapat

diterapkan:

- Peningkatan produktivitas lahan
 - ❖ Penggunaan benih unggul
 - ❖ Teknik budidaya yang lebih efisien misalnya tanam jajar legowo
 - ❖ Peningkatan kualitas irigasi agar pasokan air tetap stabil
 - Dukungan infrastruktur dan teknologi

Pemanfaatan alat mekanisasi seperti *tractor*, *combine harvester*, dan aplikasi digital untuk memantau pertumbuhan padi
 - Akses pembiayaan dan pendampingan petani

Pemberian kredit usaha tani dengan bunga rendah dan pelatihan berkala
 - Penguatan rantai pasok dan pasar

Mendorong kemitraan antara petani, koperasi, dan industri pengolahan padi
- b. Wilayah pada kuadran II (sektor non basis, prospektif), memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah produksi padi yang lebih signifikan. Beberapa saran yang dapat diterapkan :
- Ekspansi dan optimalisasi lahan pertanian
 - ❖ Mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan
 - ❖ Mendorong sistem pertanian beririgasi
 - Penguatan infrastruktur pendukung
 - ❖ Peningkatan akses terhadap jaringan irigasi
 - ❖ Membangun jalan usaha tani
- c. Wilayah pada kuadran III (sektor basis, non prospektif). Sebelumnya merupakan daerah utama dalam produksi padi, namun kini menghadapi tantangan yang membuat pengembangannya kurang berpotensi di masa depan. Beberapa saran yang dapat diterapkan:
- Akses permodalan dan Insentif Pemerintah
 - ❖ Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani
 - ❖ Mengadakan pelatihan bagi petani tentang budidaya padi
 - ❖ Mempermudah akses petani terhadap pupuk berkualitas, benih unggul
 - ❖ Pembentukan kelompok tani atau koperasi
 - ❖ Mempermudah akses petani ke program kredit usaha tani
 - ❖ Memberikan insentif atau bantuan alat pertanian
 - Diversifikasi sektor pertanian
 - ❖ Mengalihkan sebagian fokus dari padi ke komoditas pertanian lain yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan iklim daerah
 - ❖ Mendorong budidaya tanaman hortikultura, palawija, atau tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi
 - ❖ Mengembangkan sektor peternakan atau perikanan sebagai alternatif sumber pendapatan bagi petani

- Reorientasi kebijakan pemerintah
 - ❖ Mengembangkan kebijakan insentif bagi petani yang beralih ke komoditas lain yang lebih prospektif
 - ❖ Meningkatkan program rehabilitasi lahan untuk mengatasi degradasi tanah
 - ❖ Memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi petani agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan sektor pertanian
 - Peningkatan ekonomi lokal melalui agroindustri
 - ❖ Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat meningkatkan nilai ekonomi produk lokal
 - ❖ Mendorong pengembangan produk olahan berbasis padi, seperti tepung beras, beras organik, atau makanan olahan berbasis padi
 - ❖ Memperluas jaringan distribusi dan pemasaran produk pertanian agar lebih kompetitif di pasar regional maupun nasional
- d. Wilayah pada kuadran IV (sektor non basis, non prospektif). Daerah yang tidak memiliki peran signifikan dalam produksi padi dan juga tidak memiliki prospek untuk dikembangkan di masa mendatang. Beberapa saran yang dapat diterapkan:
- Diversifikasi komoditas pertanian yang lebih sesuai
 - ❖ Beralih ke tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan, seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, atau hortikultura (sayuran dan buah-buahan)
 - ❖ Mengembangkan tanaman perkebunan, seperti kakao, kopi, kelapa, jambu mete
 - Pengembangan sektor peternakan dan perikanan
 - ❖ Memanfaatkan lahan yang kurang cocok untuk padi dengan beternak sapi, kambing, ayam, atau itik yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah
 - ❖ Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya ikan air tawar jika memiliki akses ke sumber air yang cukup
 - ❖ Meningkatkan produksi ternak dan ikan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi, serta akses terhadap pakan dan obat-obatan yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F., Imran, S., & Rauf, A. (2022). Analisis Ketersediaan Beras Di Kabupaten Gorontalo Selang Tahun 2021-2030. *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 6(3), 187–197. <https://doi.org/10.37046/Agr.V6i3.16138>
- Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2012). *Kajian Status Provinsi Nusa*

- Tenggara Timur Sebagai Provinsi Kepulauan Ditinjau Dari Perspektif Hukum.
- Badan Pusat Statistik (2024a). Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (Angka Tetap). Jakarta : BPS. Dikutip dari <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/1413/pada-2024-->
- Badan Pusat Statistik (2024b). Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (ton GKG), 2024. Jakarta : BPS. Dikutip dari <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/OT15Izl=/produksi-padi-ton-gkg-di-nusa-tenggara-timur-2024.html>
- Badan Pusat Statistik (2024c). Yuk Mengenal Survei Kerangka Sampel Area (KSA). Dikutip dari <https://blitarkab.bps.go.id/id/news/2024/07/02/342/yuk-mengenal-survei-kerangka-sampel-area-ksa.html>
- Christiani, N. V. (2024). *Analisis Daerah Potensi Produksi Padi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menggunakan K-Means Cluster*. 4(1), 1–11.
- Handani, W. M., Kusnadi, N., & Rachmina, D. (2021). Prospek Swasembada Beras Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(1), 67–78. <https://doi.org/10.29244/jai.2021.9.1.67-78>
- Hendayana, R. (2003). Aplikasi Metode Location Quotient (Lq) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Jurnal Informatika Pertanian*, 12(Desember 2003), 1–21. [Http://www.litbang.pertanian.go.id/Warta-lp/Pdf-File/Rahmadi-12.Pdf](http://www.litbang.pertanian.go.id/Warta-lp/Pdf-File/Rahmadi-12.Pdf)
- Jafar, R., & Meilvidiri, W. (N.D.). *Analisa Location Quotient (Lq), Dynamic Location Quotient (Dlq), Dan Klasifikasi Carvalho Dalam Menentukan Potensi Ekonomi Kabupaten Takalar*.
- Kause, W. L., Helfiarne, M. R., Yosef, ;, Komba, T., Achmad, ;, Selsus, S. ;, Djesse, T., Pendidikan, B., Daerah, P., Nusa, P., Timur, T., Feter, J., & Kolhua-Kupang, F. (N.D.). *Kajian Status Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Provinsi Kepulauan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Study Of Ntt Province's Status As An Island Province: Overview From Law Perspective*.
- Kepmentan Nomor 472. (2018). *Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018*.
- Kurniati, N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Struktur Perekonomian Wilayah Kota Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 15(1), 3799–3806. [Http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/](http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/)
- Muhajirin, Damayanti, Y., & Elwamendri. (2014). Alumni Jurusan Agribisnis Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unja 2) Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Unja. *Sosio*

- Ekonomika Bisnis*, 17(1), 82–91.
- Muhammad, D. Y., & Kurniadi, B. D. (2024). Genealogi Kebijakan Beras Indonesia 1998-2021. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 1–23.
<https://doi.org/10.14710/Jiip.V9i1.21904>
- Mulyono, J., & Munibah, K. (2016). Pendekatan Location Quotient Dan Shift Share Analysis Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Di Kabupaten Bantul. *Informatika Pertanian*, 25(2), 221.
<https://doi.org/10.21082/lp.V25n2.2016.P221-230>
- Nugroho, A. D. (2010). Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Di Pulau Jawa. In *Agro Ekonomi* (Vol. 17, Issue 1).
<https://doi.org/10.22146/Agroekonomi.17868>
- Pembangunan, P., Nasional, P., Jangka, F., Dasar, U., Nomor, U., Nasional, P. P., Indonesia, R., & Tahun, R. I. (2025). 202* 2045.
- Pribadi, Y. (2021). *Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient Dan Shift-Share Analysis Central Lampung Regency Competitiveness Measurement: Location Quotient And Shift-Share Analysis*.
- Simamora, P. B., Kifli, F. W., Fakultas, M., & Instiper, P. (2017). *Analisis Dlq (Dynamic Location Quotient) Terhadap Sektor Ekonomi Di Propinsi Sumatera Utara* (Vol. 2, Issue 1).
- Sofiana, V., & Sari, C. P. M. (2022). Analisis Location Quotient Hasil-Hasil Pertanian Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*, 5(2), 31.
<https://doi.org/10.29103/Jepu.V5i2.8792>
- Undang-Undang, P. (2024). *Visi, Misi, Dan*. 20(218684).